

**PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN
(SPP) DI DESA KOTA BANGUN II KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Shalshabelia Meilinda Putri, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 1, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Shalshabelia Meilinda Putri

NIM : 1502015085

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 21 November 2023

Pembimbing I



Dini Zufiani, S.Sos, M.Si
NIP. 19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 197-208	

PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI DESA KOTA BANGUN II KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Shalshabelia Meilinda Putri ¹, Dini Zulfiani ²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengelolaan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan yaitu Kepala Desa Kota Bangun dan Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Sedangkan yang menjadi informannya yaitu orang yang berkompeten di bidang pengelolaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kota Bangun II telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ikut serta dalam program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ini. Faktor pendukung penerapan program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan bantuan dari dinas-dinas terkait dalam mengenalkan kepada masyarakat apa itu Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya minat masyarakat untuk usaha serta penyalahgunaan dana SPP.

Kata Kunci : *Pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan*

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi salah satu hal utama yang harus ditangani oleh pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, serta meningkatkan perekonomian di dalam masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang bersifat sistematis dan menyeluruh. Namun dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang di dapatkan oleh masyarakat miskin tidak seperti yang diharapkan, tetap saja tidak menumbuhkan kondisi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Shalshabelia05@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

perekonomian masyarakat miskin, yang di mana kesejahteraan yang mereka impikan masih sangat jauh dari kenyataan.

Berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memajukan desa, Salah satunya melalui PNPM-M Perdesaan (PNPM-MP) yang masih berjalan hingga detik ini, di mana program PNPM-MP ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dengan mencanangkan sebuah program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) seperti yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan, BAB II Pasal 3 yang menyebutkan maksud tujuan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yaitu dengan tujuan membantu pengembangan KUBP dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan.

Simpan pinjam Perempuan (SPP) merupakan sebagian jenis kegiatan yang dibiayai melalui cadangan Bantuan Koordinasi Masyarakat dari Program Nasional Penguatan Masyarakat Negara Otonom (BLM PNPM-MP). Sumber dan syarat penjabatan simpanan Dana Cadangan dan Kredit (SPP) Perempuan dari Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Daerah (APBD), kecamatan mendapat jatah BLM paling besar sebesar 25% (Direktorat Jenderal Penguatan, 2014).

Simpan pinjam Perempuan (SPP) dalam rangka penambahan modal bagi kelompok perempuan dalam rangka membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perdagangannya. Dengan adanya SPP ini, mereka mengalami perubahan yang signifikan. SPP diselenggarakan di setiap kota dan diawasi oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. SPP poin untuk membantu individu yang tidak memiliki modal untuk membuka perdagangan. Untuk membuat kredit ini, peminjam langsung menghubungi atau mengunjungi pihak pengelola dengan syarat peminjam adalah orang bawaan yang bertempat tinggal di kawasan yang bersangkutan dan uang yang dipinjam pihak tersebut digunakan untuk berdagang. Di SPP tidak ada batasan untuk meminjam, tapi atau mungkin seimbang dengan perdagangan yang akan dijalankan dan jumlah individu dalam kelompok yang akan meminjam cadangan. Pengaturan angsuran SPP dimulai dari saat ia meminjam sampai dengan batasan yang telah ditentukan.

Desa Kota Bangun II di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan desa yang saat ini masih menjalankan program tersebut. PNPM-M yang dijalankan di Desa Kota Bangun adalah SPP dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan melakukan pemberian modal kepada perempuan-perempuan yang memiliki usaha guna membantu meningkatkan kualitas dari usaha mereka. PNPM-MP kemudian memiliki program UPK. Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa No. 006/X/2015 tentang kerjasama antardesa BAB III Pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa ruang lingkup kerjasama antardesa meliputi kegiatan penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan PNPM-MP serta program pendukungnya, pelaksanaan pemberdayaan

pemerintah, pembangunan dan ekonomi serta kemasyarakatan. Namun, dalam kegiatan penyelenggaraan dan pelestarian PNPM-MP ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sehingga masih banyak program kelompok simpan pinjam yang tidak tepat sasaran, mengakibatkan penyelenggaraan PNP-M belum optimal untuk bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di Kota Tamban Baru Selatan sehubungan dengan cadangan SPP. SPP diselenggarakan di setiap kota kecamatan dan diawasi oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh individu dari masing-masing kelompok. Toko SPP dipinjamkan oleh Kelompok Penyelenggara Pergerakan (TPK) atau petugas di lingkungan kota dan Unit Penyelenggara Aksi (UPK) atau petugas di lingkungan kelurahan kepada pihak yang tidak berhak mendapatkannya, dan perseorangan yang meminjam toko SPP tidak berhak mendapatkannya. dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perdagangan namun atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bergulir dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kota Bangun Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa latin "*organum*" yang berarti alat atau badan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang dalam masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa organisasi juga merupakan masyarakat dalam lingkup kecil. Suatu organisasi sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai sarana sosialisasi dan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Torang (2014) menyatakan bahwa kita secara alami diperkenalkan ke organisasi, diajarkan oleh organisasi, dan secara praktis kita semua menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Akibatnya, orang dapat mengatakan bahwa organisasi adalah elemen sosial yang direncanakan secara sengaja dengan batas-batas yang dapat dikenali dan bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2011), setiap jenis organisasi antara setidaknya dua individu yang bekerja sama dan secara resmi terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu keamanan yang berisi satu/beberapa kelompok disebut bos dan satu/seseorang/kumpulan yang disebut bawahan.

Dari teori atas, bahwa organisasi pada dasarnya digunakan sebagai wadah bagi individu-individu untuk berkumpul, berkoordinasi secara wajar dan sengaja, diatur, diarahkan dan dikendalikan dalam menggunakan aset, yayasan, informasi, dan lain-lain secara produktif dan bersama-sama demi berhasil mencapai tujuan organisasi.

Sebagaimana definisinya, organisasi merupakan kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan ini, setiap organisasi harus memiliki tujuan sendiri yang jelas berbeda-beda tergantung kesepakatan antara individu-individu dalam organisasi tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009), alasan didirikannya perkumpulan adalah untuk melihat bahwa sumber daya manusia para pengurus itu ada (*exist*), penting untuk menambah kegunaan umum dari perkumpulan itu. Sumber daya manusia para eksekutif bukanlah tujuan definitif dari sebuah organisasi, melainkan sebagai alat mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebuah unit sumber daya manusia eksekutif adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk melayani bagian yang berbeda dari organisasi.

Dari keseluruhan pemahaman mengenai tujuan organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa kunci kelangsungan hidup organisasi terletak pada seberapa efektif organisasi memupuk bakat orang-orangnya sembari meminimalkan kelemahan mereka. Efektivitas organisasional tergantung pada efektivitas sumber daya manusianya. Tanpa adanya tenaga kerja yang kompeten, organisasi tidak akan mampu mencapai prestasi ataupun keberhasilan meraih tujuannya, sekalipun organisasi tersebut mampu bertahan

Pengelolaan

Menurut Koontz (dalam Winarsih 2014), pengelolaan adalah suatu upaya untuk mencapai/mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan/usaha orang lain. Selain itu, sependapat dengan Terry (dalam Winarsih 2014), pengelolaan adalah suatu persiapan khusus dan khusus yang terdiri dari pengaturan, pengorganisasian, serta penetapan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menentukan arah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

pengelolaan i dapat merupakan suatu sarana pengaturan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian usaha-usaha anggota suatu organisasi, serta memaksimalkan penggunaan aset-aset yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengaturan, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan perolehan, kemajuan, pemberian imbalan, penggabungan, pemeliharaan dan isolasi tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan muncul dengan dua premis mayor, berupa kegagalan yang mengacu pada gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta

harapan kemunculan alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antargenerasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai (Friedmann dalam Maani, 2011:53). Dua premis yang menyertai timbulnya konsep pemberdayaan ini didasari oleh kesimpulan atas kenyataan yang terjadi dan dihidupi dalam situasi dan kondisi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep perbaikan yang bersifat elektif menekankan kemandirian pengambilan keputusan sekelompok komunitas berdasarkan aset individu, dukungan, pemerintahan kerakyatan, dan penguatan sosial melalui keterlibatan terkoordinasi yang pusatnya adalah wilayah dalam menyusun rencana penguatan komunitas melalui isu-isu terdekat. (Maani, 2011:54).

Maka sebagaimana definisi para ahli mengenai pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan individu atau sekelompok orang agar memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di hidup sosial bermasyarakat.

Simpan Pinjam Perempuan

Dana Investasi dan Kredit Perempuan (SPP) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perempuan dengan latihan atau latihan mengawasi simpanan dana investasi dan mengawasi simpanan uang muka. Hal ini sering kali merupakan gerakan untuk memasok modal kepada kelompok perempuan yang memiliki dana cadangan dan pelaksanaan kredit. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menyalurkan toko pemintalan khusus perempuan melalui Kelompok Dagang Bersama Perempuan (KUBP). Yang berada di bawah Balai Keluarga Penataan, Penguatan Perempuan dan Keamanan Anak Pemerintahan Kutai Kartanegara (BKBP3A) sesuai dengan informasi khusus no. 000/3125/BKBP3A/XI/2011 dan Instruksi Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Aturan Pemberian Bantuan Kemajuan Tandan Perdagangan Bersama Perempuan (KUBP).

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memudahkan akses pembiayaan usaha kecil secara sederhana, pemenuhan kebutuhan subsidi usaha skala kecil, pemenuhan kebutuhan pembiayaan sosial yang esensial, dan penguatan kelembagaan bagi kaum wanita, khususnya dalam pemberdayaan penurunan keluarga kurang mampu dan pembentukan pintu-pintu terbuka potensial kerja di tanah air daerah.

Selain itu, tindakan ini juga memiliki tujuan yang berbeda, untuk lebih spesifik mempercepat metode yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan dasar bisnis atau subsidi sosial, membuka pintu bagi wanita untuk lebih mengembangkan ekonomi keluarga melalui pembiayaan modal usaha, memberdayakan penguatan dana investasi dan memajukan pendirian oleh wanita.

Oleh karena itu program SPP merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan serta pengangguran pada kehidupan masyarakat.

Definisi Konsepsional

Dana Investasi dan Administrasi Uang Muka (SPP) Perempuan dapat menjadi kerangka penataan, pengorganisasian, penatausahaan dan pengendalian Program Dana dan Kredit Cadangan Perempuan (SPP). Dalam pelaksanaannya, apakah pemerintahan yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan baik dan sejauh mana pemerintahan tersebut dapat memberikan bantuan agar program dapat berjalan dengan mudah. Dalam pertanyaan ini, yang dimaksud dengan administrasi adalah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan Dana Cadangan dan Kredit (SPP) Perempuan untuk masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan SPP dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan
2. Faktor penghambat dan pendukung SPP dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. *Informan* utama dan sumber data utama adalah kepala desa Kota Bangun dan Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa berkas atau arsip pada pengelolaan SPP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam keempat teknik tersebut dapat dilihat bahwa secara umum teknik data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldaña (2014) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan SPP Dalam Peningkatan Kesejahteraan Kerekonomian Perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan fokus penelitian ini, penulis telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian di lapangan guna mendapatkan hasil, yaitu tentang Pengelolaan SPP dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian mengenai hasil-hasil tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. *Perencanaan*

Perencanaan Pengelolaan program SPP di Desa Kota Bangun telah memenuhi aspek perencanaan yang matang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan musyawarah berjenjang mulai dari tingkat pemanfaat yaitu musyawarah kelompok perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa hingga musyawarah antar desa dalam pembahasan pengelolaan program yang akan dijalankan. Hal ini tentunya dapat lebih meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kondisi perekonomian masyarakat yang sangat rendah menjadi faktor pertama dalam perencanaan program SPP. Kondisi mata pencaharian sebagai petani dari kepala keluarga menjadi faktor kedua dalam perencanaan program spp dikarenakan mata pencaharian tersebut dianggap belum dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan. Kebutuhan akan modal untuk membuka usaha adalah faktor ketiga. Khusus di Desa Kota Bangun II ketiga faktor di atas menjadi faktor pendukung atau tolak ukur program dalam mengulirkan dana bantuan SPP kepada masyarakat yang dimana dalam menjalankan program spp dibutuhkan sebuah perencanaan kerangka perumusan tindakan pendukung dalam pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian di atas Tim UPK Kota Bangun menjalankan Pengelolaan program SPP dengan perencanaan yang matang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan musyawarah berjenjang mulai dari tingkat penerima manfaat yaitu musyawarah kelompok perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa hingga musyawarah antar desa dalam pembahasan pengelolaan program yang akan dijalankan. Hal ini tentunya dapat lebih meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. *Pengorganisasian*

Pengorganisasian adalah sebuah proses pengelompokan orang, peralatan, sumber daya, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang nantinya akan dipadukan untuk melaksanakan tindakan hingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian merupakan hal penting untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Dilihat dari aspek pengorganisasian, pengelolaan SPP di Desa Kota Bangun II juga dapat dikategorikan baik dengan melihat kondisi yang ada di lapangan. Penentuan anggota kelompok sudah didasarkan dari musyawarah sehingga anggota dari masing masing kelompok saling memiliki keterkaitan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam kelompoknya.

Dari wawancara tersebut, tampak bahwa aspek perencanaan dalam pengelolaan SPP adalah dengan mengadakan acara musyawarah desa yang dikhususkan untuk perempuan yang memiliki tujuan untuk membicarakan ide yang dimiliki oleh kelompok perempuan, agar kemudian program SPP di Desa Kota Bangun II dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang perekonomian perempuan, secara khusus di kalangan ibu-ibu daerah setempat.

Pelaksanaan penyaringan usulan program SPP di Desa Kota Bangun II, Ketua UPK Kecamatan Kota Bangun, Bapak Faisyal, menyatakan bahwa untuk

program pemberdayaan khususnya pada penduduk setempat dapat dilirik pada suatu penyebab. penyebab antara lain Kondisi keuangan masyarakat yang sangat memprihatinkan, maka dibuatlah program SPP dan disebarakan kepada masyarakat. Yang diperhitungkan saat ini adalah kondisi para kepala keluarga, khususnya di Kota Bangun II, yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak. Pekerjaan ini masih kurang dalam menunjang perekonomian dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan keluarga lainnya. Perhitungan ketiga dilihat dari perlunya modal usaha yang harus dimiliki masyarakat untuk mengelola usahanya agar bisa lebih besar dan maju. Khusus di Kota Kota Bangun II, ketiga variabel di atas merupakan komponen pendukung atau tolak ukur dalam penyaluran bantuan SPP cadangan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperhatikan khususnya dari kondisi keuangan masyarakat yang miskin dan gaji keluarga yang kurang, program SPP ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu, namun juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usaha. Mereka juga diberikan uang muka untuk melakukan bantuan bantuan bergilir SPP, khususnya pada tandan perempuan.

c. Pengarahan

Pengarahan bertujuan untuk menjelaskan, memberikan pelajaran dan arahan kepada para pekerja agar menjalankan pekerjaannya secara benar. Dalam SPP di Desa Kota Bangun II, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa memberikan masukan, arahan terkait dana yang disalurkan kepada anggota kelompok.

Dari hasil wawancara, didapati hasil bahwa pengarahan yang telah dilaksanakan cukup membantu memberi pemahaman bagi target audiens yang diharapkan mampu memanfaatkan program SPP di Desa Kota Bangun II sebaik-baiknya. Tidak hanya memberi pemahaman, namun berdasarkan wawancara tersebut ternyata pengarahan yang diberi mampu meningkatkan minat pelaku usaha dalam mengikuti program secara antusias, terlebih dengan bantuan yang diberi melalui saran-saran usaha potensial yang dapat dilakukan di Desa Kota Bangun II.

Pihak PNPM-MP mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam usaha. Kegiatan pengarahan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Namun kondisi pandemik dan pembatasan kegiatan tentunya berpengaruh terhadap banyak aspek termasuk kesempatan berusaha serta daya beli masyarakat pada umumnya sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menunggu perubahan kelonggaran dari keadaan pandemik tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah dirumuskan. Aspek pengawasan merupakan kegiatan terakhir dalam suatu manajemen untuk memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk agar pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Demikian juga yang terjadi dalam

pengelolaan SPP yang terjadi di Desa Kota Bangun II mengenai administrasi atau pencatatan-pencatatan pengembalian uang pinjaman oleh UPK kecamatan kepada TPK desa dilakukan secara rapi, benar, teliti, dan teratur.

Melalui penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa dalam pelaksanaannya, program SPP di Desa Kota Bangun II mengalami cukup banyak tantangan terlebih terkait pandemik yang berlangsung sebelumnya. Kendati demikian, melihat bagaimana Bapak Mawardi mampu memahami masyarakatnya serta Ibu Ummu Kayinah yang melihat kendala dalam kelompoknya, tampak jelas bahwa terdapat pengawasan yang baik dalam masyarakat Desa Kota Bangun II menjalankan program SPP.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perubahan pengaturan dijadikan sebagai masukan dalam penilaian program. Pengawasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan oleh masyarakat sendiri, mengingat masyarakatlah yang mempunyai cara suatu tindakan program, dan merekalah yang mampu memantau dan mengatur cara pelaksanaan suatu program. Ketika kendala dari suatu program yang dijalankan diketahui, maka diharapkan ke depannya didapati suatu solusi yang mampu menjadi pemecah dari permasalahan yang dihadapi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi penurunan jumlah kelompok dari semula 9 kelompok menjadi 7 kelompok, dikarenakan ada 2 kelompok yang telah selesai dan melunasi jumlah pinjaman mereka. Hal ini merupakan indikasi yang baik dari pelaksanaan program yang telah berjalan. Namun secara rata-rata persentase pengembalian, terdapat penurunan dari 69% menjadi 63%. Hal ini terjadi karena hanya ada 2 kelompok yang melakukan pembayaran pengembalian pinjaman, dan ada 5 kelompok lainnya yang pada bulan Desember 2021 belum dapat melakukan pembayaran pengembalian pinjaman. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, hambatan ini utamanya terjadi karena pengaruh adanya keadaan pandemi serta pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak sektor yang belum dapat berfungsi secara optimal khususnya perdagangan umum seperti pasar dan pertokoan. Namun komitmen dari masing masing kelompok masih dapat dipertahankan dan masih dinilai dapat meneruskan program yang telah disusun. Komitmen dari pemerintah desa juga sangat besar dengan adanya pendampingan intensif pada kelompok kelompok yang masih kesulitan dalam melaksanakan program kegiatannya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kota Bangun II telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan namun tentunya terdapat kendala-kendala operasional yang masih dinilai dapat dikendalikan sehingga tujuan akhir dari program ini dapat tercapai.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pengelolaan SPP Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Perempuan di Desa Kota Bangun II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pengimplementasian program SPP dalam Desa Kota Bangun II tidak

terlepas dari beberapa halangan-halangan dalam operasional. Halangan-halangan tersebut umumnya disebabkan oleh individu-individu pelaksana program yaitu kelompok perempuan sebagai pemanfaat program. Salah satu kendala yang menghambat program adalah kurangnya keinginan penduduk setempat agar bergabung atau berpartisipasi pada program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta salah satu faktor yang menghambat adalah kondisi pandemi serta pembatasan kegiatan masyarakat.

Masih saja penduduk banyak yang tidak peduli serta antipasti terhadap apa yang sudah pemerintah lakukan. Mereka menganggap bahwa yang dilakukan tersebut tidak juga dapat mensejahterakan mereka sehingga apabila ada suatu rancangan program pemberdayaan masyarakat seolah acuh tak acuh.

Dalam mendapatkan keinginan salah satunya pencapaian pada suatu usaha sangatlah membutuhkan pengorbanan. Pada suatu usaha bisnis terkadang-kadang selalu ada saja halangan dan rintangan. Tidak tingginya tingkat pendidikan penduduk setempat khususnya Kota Bangun II secara umum menjadi salah satu penghambat karena masyarakat masih belum memiliki prospek usaha dalam penggunaan dana.

Pada dasarnya program SPP adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih bebas. Peningkatan taraf hidup ini dapat dicapai melalui perdagangan, perluasan lapangan usaha, khususnya perempuan yang belum memiliki pekerjaan, sudah mempunyai berbagai pekerjaan pokok dan mulai berdagang dengan keyakinan bahwa mereka akan mampu menafkahi kehidupan sehari-hari mereka. hidup. Harapan demi kepercayaan tentunya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan SPP store yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh oknum-oknum yang berkumpul di SPP, mereka mengakui bahwa toko-toko tersebut tidak dimanfaatkan untuk membuka perdagangan karena ketika toko SPP keluar, mereka memerlukan cadangan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anak yang masih bersekolah.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kota Bangun II secara umum menjadi salah satu penghambat karena masyarakat masih belum memiliki prospek usaha dalam penggunaan dana. Mayoritas mata pencaharian sebagai petani juga menjadi salah satu faktor penghambat, sehingga banyak anggota kelompok yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan konsumtif.

Serta Faktor pendukungnya Pada penerapan program SPP di Desa Kota Bangun II, terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong bagi keberhasilan penerapan program SPP. Faktor-faktor pendukung program SPP di Desa Kota Bangun II ialah sudah terbentuknya kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok tersebut bermula dari kelompok arisan pengajian dan juga kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK), Faktor pendukung lainnya adalah bantuan-bantuan yang didapat dari dinas- dinas terkait dalam melakukan promosi atau pengenalan ke masyarakat luas terkait program SPP terutama di wilayah Kota Bangun II menjadi hal yang mendukung penerapan program spp ini.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Partisipasi Sistem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) menggunakan sistem pendanaan bergulir dimana setiap peminjam mematuhi syarat- syarat dan tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan mengisi proposal pinjaman.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program SPP di Desa Kota Bangun II yaitu: kurangnya kepercayaan masyarakat dari pemerintah untuk program yang berikan untuk masyarakat pada akhirnya menimbulkan rasa enggan tahu dan kurang peduli secara baik tentang program SPP, rendahnya minat masyarakat untuk usaha serta serta penyalahgunaan pemanfaatan dana SPP yang seharusnya digunakan untuk usaha tetapi dipergunakan untuk keperluan konsumtif.
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program SPP di Desa Kota Bangun II telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan namun tentunya terdapat kendala-kendala operasional yang masih dinilai dapat dikendalikan sehingga tujuan akhir dari program ini dapat tercapai.
4. Keadaan yang tidak menentu akibat adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemik menjadi kendala utama yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat sehingga mengganggu terlaksana program serta kegiatan kelompok.

Saran

1. Kelompok pemanfaat dana SPP diharapkan mampu untuk mengubah persepsi bahwa peluang usaha tidak bisa diciptakan. Ada banyak cara untuk menciptakan peluang usaha dalam hal apapun dan dibidang manapun. Peran pemerintah dalam pengarahan sangat penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan usaha dalam bentuk pelatihan maupun pembelajaran
2. Untuk UPK, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi UPK bahwa program tersebut tidak berjalan sesuai dengan PNPM-MP-PTO karena banyak yang tidak menggunakan dana SPP secara tepat. UPK diharapkan dapat mendirikan lembaga pelatihan kewirausahaan yang memungkinkan masyarakat menciptakan peluang usaha sendiri dan meningkatkan keuangan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
Gitosudarmo, Indriyo. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Cetak Ketiga. Yogyakarta: BPFE

- Maani, Karjuni Dt. 2011. *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Demokrasi, Vol. 10 No. 1 hlm. 53.
- Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor:006/X/2015 Tentang Kerja Sama Antardesa Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kota Bangun, Januari 2011.
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta: Graha Ilmu.
- Torang, Syamsir 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: ALFABETA. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.